

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2019





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2019

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju “BPOM baru”.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2019. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, April 2019
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Standardisasi.....	10
III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	11
IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM.....	15
V. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan	16
VI. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)	17
VII. Kerjasama Internasional	18
VIII. Pengelolaan Anggaran	19
IX. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM.....	19
PENUTUP	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2019	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	7
Gambar 6.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	7
Gambar 7.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019	8
Gambar 9.	Profil Laporan Efek Samping	9
Gambar 10.	Total Posts by Network Q1	11
Gambar 11.	Audience Growth Rate	11
Gambar 12.	Total Audience by Network Q1	11
Gambar 13.	Total Engagement by Network Q1	11
Gambar 14.	Profil Profesi Pengakses Layanan Informasi dan Pengaduan	12
Gambar 15.	Media Layanan Informasi dan Pengaduan	12
Gambar 16.	Komoditi Paling Ditanyakan	13
Gambar 17.	Topik Informasi Paling Ditanyakan	13
Gambar 18.	Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d. Triwulan I Tahun 2019	19
Gambar 19.	Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d. Triwulan I Tahun 2019	19



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN I TAHUN 2019

BPOM Semakin Dekat untuk Melayani dan Melindungi Masyarakat



Jakarta / Selasa (15/01/2019)

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, BPOM menyelenggarakan kegiatan bertajuk *Media Outlook* “Refleksi Kinerja BPOM 2018 dan Proyeksi 2019” bertempat di Wisma Antara.

Acara ini bertujuan untuk memaparkan kepada media dan masyarakat tentang apa saja yang telah dilakukan BPOM selama tahun 2018 dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Beberapa *stakeholder* dan undangan dari K/L, Perguruan Tinggi maupun Asosiasi yang hadir dalam acara tersebut ikut memberikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh Kepala BPOM. Pada acara ini juga diperkenalkan aplikasi BPOM *mobile*. Aplikasi ini dapat dipergunakan untuk mengetahui produk yang beredar. Dengan begitu, BPOM dapat semakin dekat untuk melayani dan melindungi masyarakat.

Jalin Sinergi dengan Wanita Pejuang Bangsa



Jakarta / Kamis (24/01/2019)

Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pemberdayaan perempuan di bidang keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan menjadi suatu kebutuhan.

Mengingat hal tersebut, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Ketua Umum Wirawati Catur Panca (WCP), Pia Ferasti Megananda tentang Peningkatan Peran Wirawati Catur Panca di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan. WCP merupakan bagian dari Organisasi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Kegiatan bersama yang akan dilaksanakan meliputi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan; pemberdayaan anggota WCP untuk menjadi fasilitator dan kader dalam rangka KIE kepada masyarakat yang lebih luas; serta bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota WCP untuk membangun keluarga sehat dan sejahtera.

Inovasi BPOM di HUT ke-18, #BAKTIBPOMUNTUKNEGERI



Jakarta / Minggu (10/02/2019)

Sejak hadir mulai tahun 2001 sampai dengan usia ke delapan belas tahun ini, BPOM berbakti dan mengabdikan untuk melayani dan melindungi masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja BPOM, pada puncak perayaan HUT yang diselenggarakan di area parkir Sarinah Jakarta, BPOM merilis 13 inovasi yang dibagi dalam 3 kelompok, yakni percepatan pelayanan publik, dukungan kebijakan, dan peningkatan daya saing. Inovasi untuk percepatan pelayanan publik antara lain melalui pengembangan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIK); NOTIFKOS-NEW; Surat Keterangan Ekspor dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE); e-Sertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); serta 2D Barcode. Inovasi dukungan kebijakan terdiri dari Aplikasi Peta Rawan Kasus; BPOM Command Center; dan Aplikasi Respon Cepat. Sedangkan untuk inovasi peningkatan daya saing, BPOM telah membuat aplikasi Istana UMKM; Aplikasi e-Standard Pangan; dan Konsorsium Percepatan Pengembangan Pemanfaatan Fitofarmaka.

Dukung Pengembangan Industri Obat Tradisional Dalam Negeri



Semarang / Rabu (20/02/2019)

BPOM RI memberikan Sertifikat Izin Edar sediaan Kapsul Lunak kepada PT. Sido Muncul sebagai bentuk apresiasi kepada PT. Sido Muncul karena menjadi pelopor dalam memperkenalkan produk jamu sebagai warisan budaya Indonesia ke pasar nasional maupun internasional. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Menko PMK, Puan Maharani yang didampingi Kepala BPOM, Penny K. Lukito.

Bentuk dukungan BPOM dalam pengembangan industri obat tradisional antara lain dengan menginisiasi terbentuknya konsorsium fitofarmaka yang melibatkan berbagai lintas sektor dan Stakeholders terkait, meningkatkan daya saing UMKM jamu dengan mengadakan Program Pembinaan dan Pendampingan UMKM Jamu, dan melakukan kegiatan pendampingan terhadap Pelaku Usaha Jamu Gendong. BPOM akan selalu berkoordinasi dengan Menko PMK untuk terus mendukung pengembangan industri obat tradisional yang didalamnya mengandung unsur-unsur budaya bangsa, dan merupakan produk yg selalu dekat dengan masyarakat.

Bersama Kemenko PMK, Badan POM Canangkan Kabupaten Sukoharjo Menuju Destinasi Wisata Jamu Pertama di Indonesia



Sukoharjo / Senin (18/03/2019)

Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang harus didorong pertumbuhannya. Oleh karena BPOM bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) didampingi Bupati Sukoharjo mencanangkan “Kabupaten Sukoharjo Menuju Destinasi Wisata Jamu Indonesia” di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai destinasi wisata jamu karena Sukoharjo memiliki aktivitas usaha jamu dari hulu ke hilir, mulai dari kebun tanaman obat herbal, UMKM Jamu dan Usaha Jamu Gendong, serta memiliki Industri Obat Tradisional.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 2.000 orang, terdiri dari komunitas Jamu/Jamu Gendong di Kabupaten Sukoharjo; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Bapak Angkat UMKM Jamu Gendong; serta beberapa organisasi wanita dan komunitas masyarakat lainnya.

Tertib Arsip Menuju Birokrasi Kelas Dunia



Jakarta / Senin (25/03/2019)

Penyelenggaraan kearsipan yang baik merupakan kewajiban seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih tertata, diperlukan peningkatan mutu kearsipan.

Badan POM berkomitmen menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem kearsipan yang andal. Oleh karena itu Kepala BPOM, Penny K. Lukito menyerahkan arsip statis kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan di Hotel Borobudur, Jakarta. Penyerahan ini disaksikan oleh jajaran pejabat eselon I dan II serta para Kepala Balai Besar/ Balai POM/ Loka POM. Kedepan diharapkan BPOM mendapatkan akreditasi pengelolaan arsip dengan nilai tinggi.

Pada rangkaian acara tersebut, ditandatangani Piagam Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sebagai komitmen untuk menghidupkan dan menginternalisasi gerakan ini di BPOM.



BADAN POM

**HASIL KEGIATAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN**

s.d. TRIWULAN I TAHUN 2019

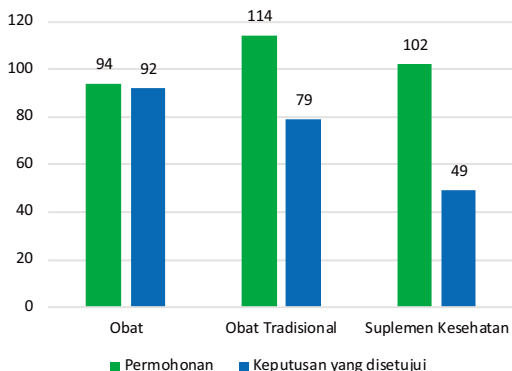
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan pre-market

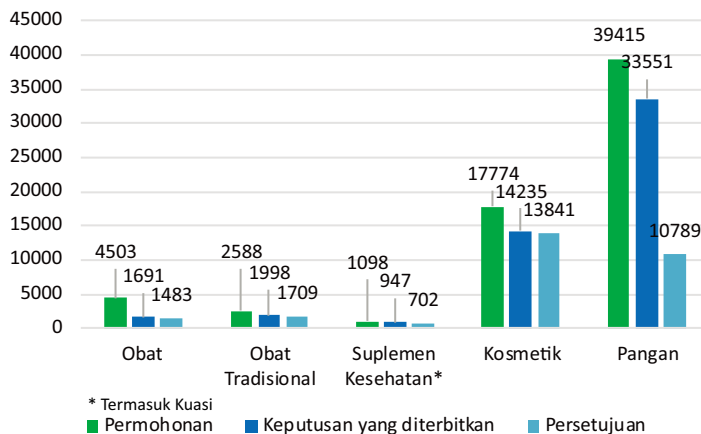
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus dilakukan registrasi di BPOM untuk dievaluasi terlebih dahulu terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi pada penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan I tahun 2019, telah diterbitkan 52.422 keputusan dan 28.524 persetujuan izin edar dari 65.378 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2019



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2019

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2019, dari 310 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 220 iklan.



Pengawasan post-market

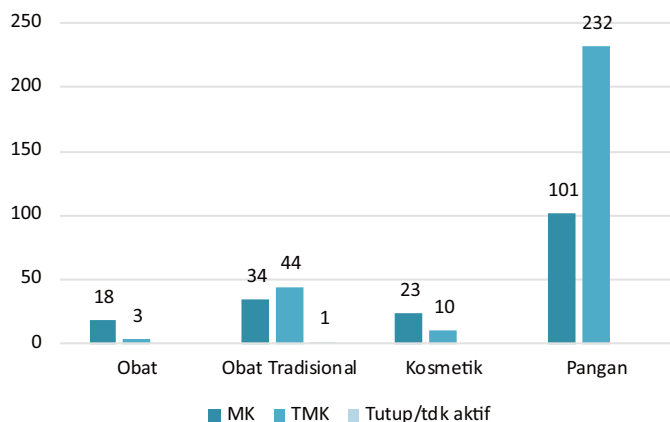
Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

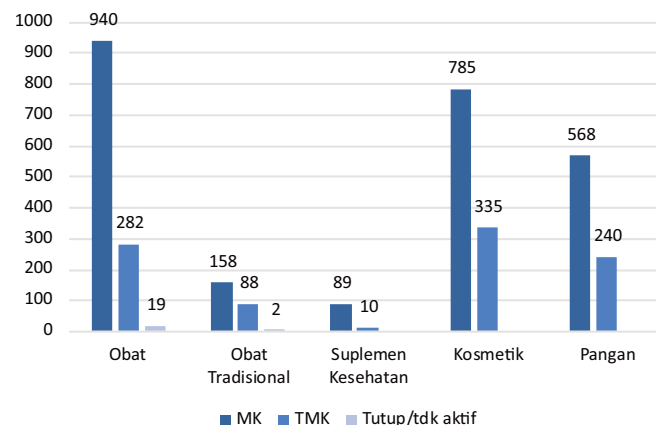
B POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2019 telah diperiksa sebanyak **4.309 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **2.351** sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2019

Sampai dengan Triwulan I tahun 2019 telah diperiksa **33.207 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **9.638** sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2019

Ket:

MK = Memenuhi Ketentuan

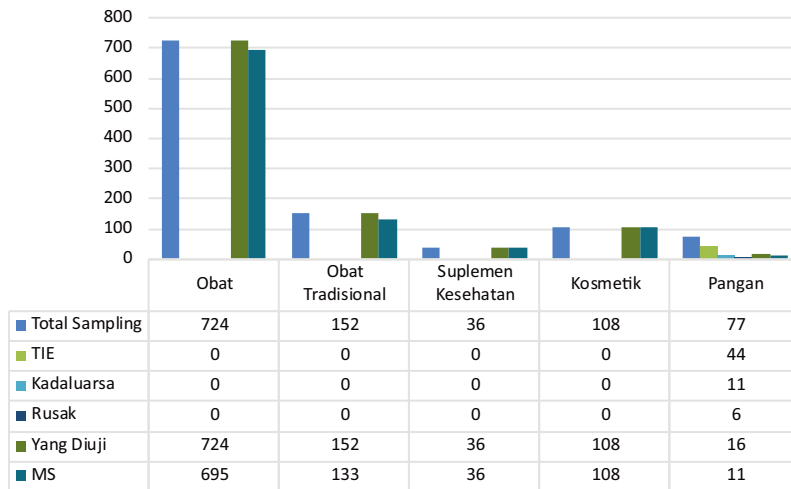
TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan

6

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2019





Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2019

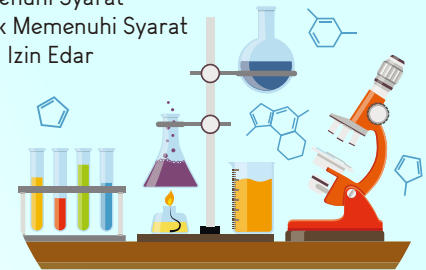
Sampai dengan Triwulan I tahun 2019, dari 1.097 sampel terdapat 44 sampel TIE, 11 Kadaluarsa, 6 Rusak, dan 1036 yang diuji dimana 983 (89,61%) Sampel MS.

Ket:

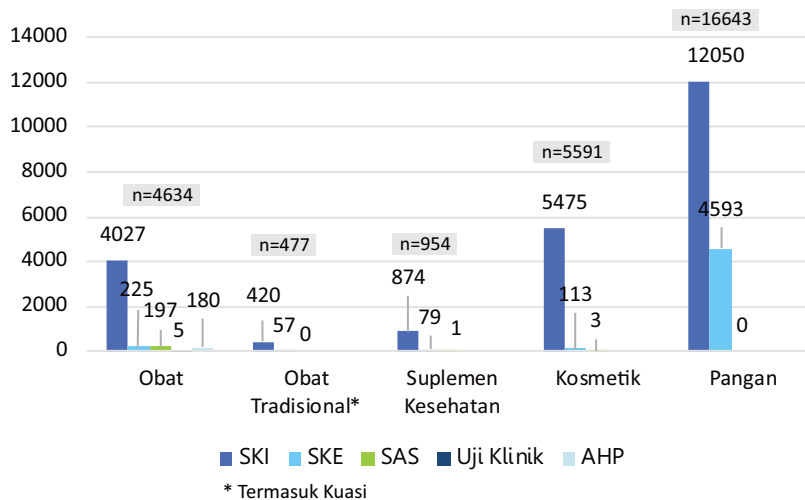
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa Izin Edar



3 Sertifikasi



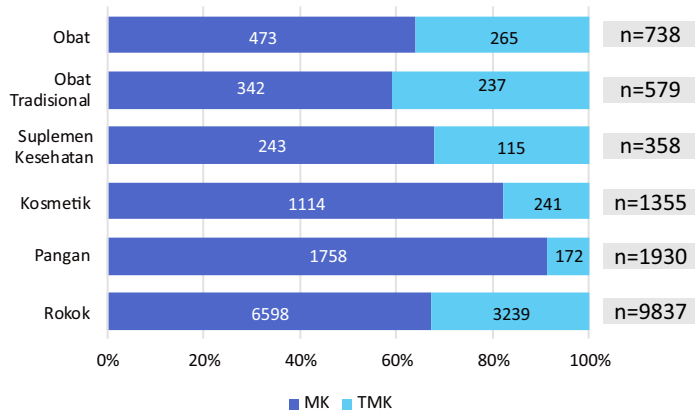
Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2019

Dalam rangka mendorong ekspor dan Impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2019 telah diterbitkan 5.067 SKE, 22.846 SKI, 201 SAS, 5 Uji Klinik, dan 180 AHP Obat dan Makanan.



Pengawasan Iklan

4



Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2019



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk

Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan I tahun 2019, dari 14.797 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 10.528 (71%) iklan memenuhi ketentuan.

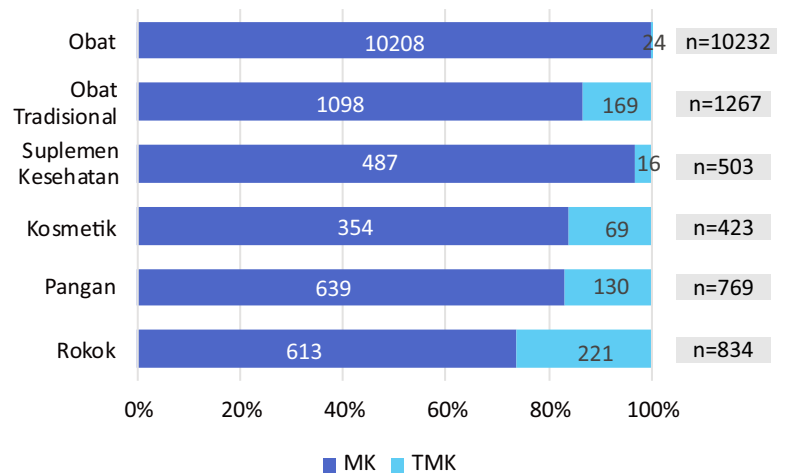


BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan

menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan I tahun 2019, dari 14.028 label Obat dan Makanan yang diawasi, 13.399 (96%) label memenuhi ketentuan.

5

Pengawasan Label



Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2019

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- ⊙ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- ⊙ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut	Persentase
Obat	1.891	1447	76,52
Obat Tradisional	56	56	100
Suplemen Kesehatan	1	1	100
Kosmetik	221	70	31,67

Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping



II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.

Obat

Telah disusun **13 standar obat**, dimana 1 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu Peraturan BPOM tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (55,56%).

Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah selesai disusun **8 standar dan kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan**.

Dari 40 standar dan kajian, yaitu:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (100%)
2. Kajian Kategori Produk Kombucha (100%)
3. Kajian Bahan Tambahan Baru *Lanurocapram*, kajian kategori produk dengan bahan baku Bawang Hitam (100%).
4. Kajian Bahan Aktif *Metil Nikotinat* (100%).
5. Kajian Pencantuman Peringatan / Perhatian untuk Produk yang Mengandung *Centella Asiatica* (100%).
6. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Baru *Polypodium leucotomos* (PL) Extract dalam Produk Suplemen Kesehatan (100%).
7. Kajian tentang Penggunaan Istilah *Nutrasetikal* pada Produk Suplemen Kesehatan (100%).
8. Kajian Plasenta Rusa sebagai Bahan Suplemen Kesehatan (100%).

Pangan

Telah disusun 14 peraturan, standar, maupun pedoman pangan olahan, dimana belum ada yang berprogres lebih dari 50%. Progres standar pangan olahan paling besar yaitu Pedoman Karakteristik Dasar Kategori Pangan Olahan (30%).



Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.



III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

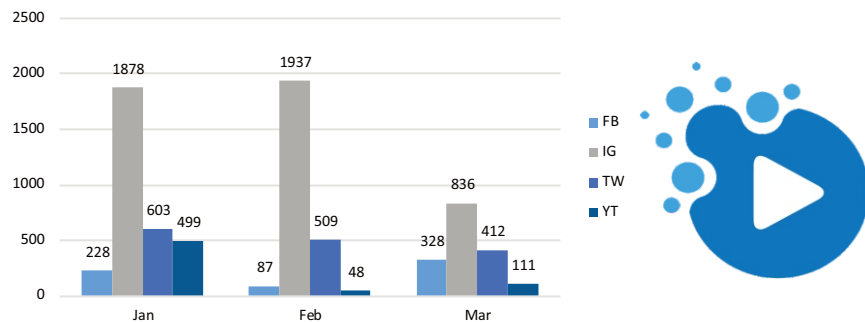
BPOM melakukan fungsi pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan Obat dan Makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 7 Siaran Pers, dan 3 penjelasan/klarifikasi berita terkait hoax yang dipublikasikan juga melalui website dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 4 kali *talkshow* atas permintaan media televisi dan 2 kali wawancara Pimpinan BPOM dengan media.

BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun *official Facebook Fanpage, Twitter, Instagram* dan *YouTube*. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah *followers* secara positif.

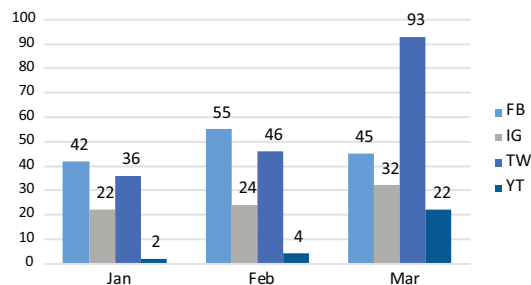
Rata-rata post sepanjang triwulan I tahun 2019 adalah 1-2 *posting* perhari dengan total postingan untuk keempat *platform* adalah 423 *posts*. Pada triwulan ini, *Twitter* merupakan *platform* yang paling aktif dengan 175 *tweets*, disusul *Facebook* dengan 142 *posts*, *Instagram* dengan 70 *posts* dan terakhir *Youtube* dengan penayangan 28 *video*.

Sepanjang Januari, Februari dan Maret, pertumbuhan *audience* tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 3208, disusul bulan Febuari sebesar 2581, kemudian Maret sebesar 1687. *Instagram* mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4651, disusul *Twitter* 1524, *Youtube* 658 dan *Facebook* 643. Meskipun *Instagram* memiliki pertumbuhan *audience* tertinggi dari semua *platform* yang ada, namun persentase pertumbuhan ada pada *Youtube* yaitu sebesar 280%.

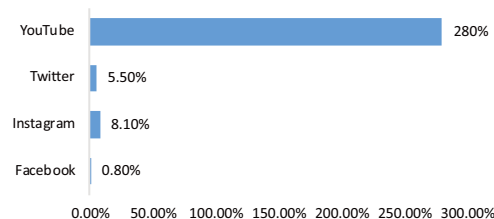


Gambar 12. Total Audience by Network Q1

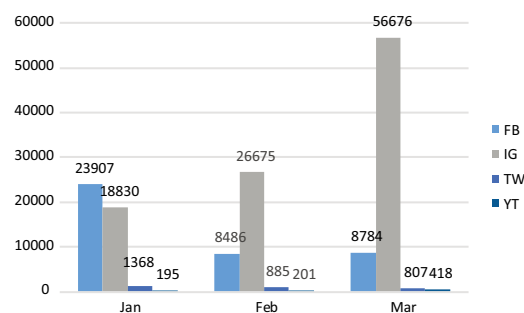
Aktivitas media sosial paling aktif dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada bulan Maret dan Januari. Secara keseluruhan *Instagram* memiliki *engagement rate* tertinggi dibandingkan *platform* media sosial lainnya yaitu sebesar 102181 *engagement*, kemudian disusul *Facebook* (41177 *engagement*), *Twitter* (3060 *engagement*) dan *Youtube* (814 *engagement*).



Gambar 10. Total Posts by Network Q1



Gambar 11. Audience Growth Rate



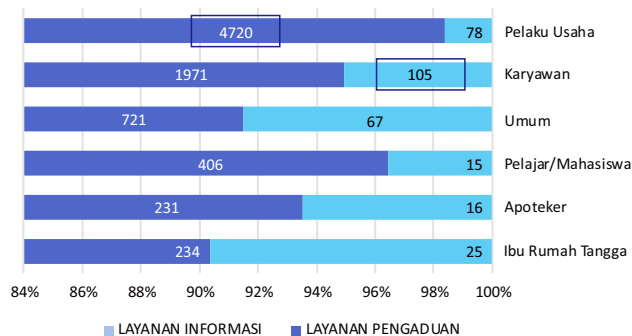
Gambar 13. Total Engagement by Network Q1

- Pada *Instagram* sendiri postingan terkait **testimoni CPNS BPOM 2019** menjadi **postingan dengan engagement rate tertinggi** (10975 views; 103 likes), sedangkan untuk *postingan* terkait pengumuman hasil akhir seleksi CPNS BPOM 2018 menjadi *postingan* dengan *comment* tertinggi (190 comments).
- **Facebook Post mengenai aplikasi BPOM Mobile** mempunyai **engagement rate tertinggi** dibandingkan dengan *postingan* lainnya, namun untuk jumlah *share* tertinggi ada pada *postingan* terkait penjelasan BPOM terkait peredaran obat keras yang dijual secara *online*.
- Pada *Twitter*, *tweet* mengenai **Penjelasan BPOM terkait peredaran obat keras yang dijual secara online** merupakan *tweet* dengan **engagement user tertinggi** dalam bentuk *retweet* (87 *retweets*), *tweet* terkait pengumuman hasil akhir seleksi CPNS mempunyai jumlah *replied* terbanyak (7 *replied*) dan *like* terbanyak (107 *likes*).
- **Video Youtube BPOM** selama periode triwulan I tahun 2019 dengan **engagement rate tertinggi** yaitu **Inagurasi Orientasi CPNS BPOM** dengan jumlah *view* mencapai 1569 *views* dan 196 *likes*, dan HUT Badan POM 18 dengan jumlah *view* mencapai 696 *views* dan 65 *likes*.

Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, telah dibentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan media komunikasi dua arah antara BPOM dan masyarakat. ULPK merupakan saluran penyampaian saran, pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat kepada BPOM.

Data layanan informasi dan pengaduan masyarakat pada triwulan I tahun 2019, menunjukkan BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta melalui *Contact Center* HaloBPOM1500533 sebesar **8.283 (96,44%) layanan informasi** dan **306 (3,56%) layanan pengaduan**.

- a. Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari **Pelaku Usaha** sebanyak **4.720 (56,98%) layanan**. Adapun layanan pengaduan sebagian besar dari **karyawan** sebanyak **105 (34,31%) pengaduan**.



Gambar 14. Profil Profesi Pengakses Layanan Informasi dan Pengaduan

- b. Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui **telepon** sebanyak **4.083 (49,29%) layanan** dan **datang langsung** sebanyak **3.419 (41,28%) layanan**. Begitu juga media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam penyampaian **pengaduan** juga melalui **telepon** sebanyak **105 (34,31%) pengaduan** dan **datang langsung** sebanyak **92 (30,07%) pengaduan**.

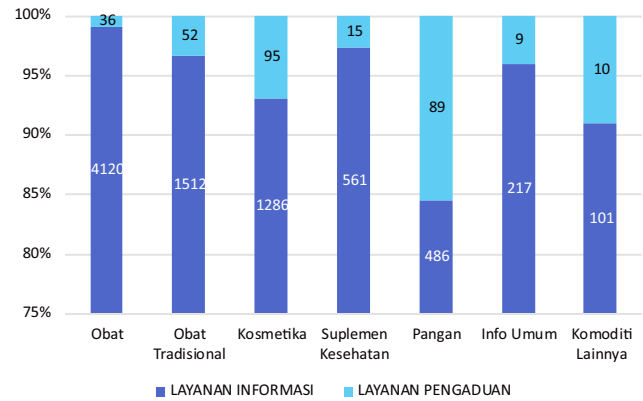


Gambar 15. Media Layanan Informasi dan Pengaduan

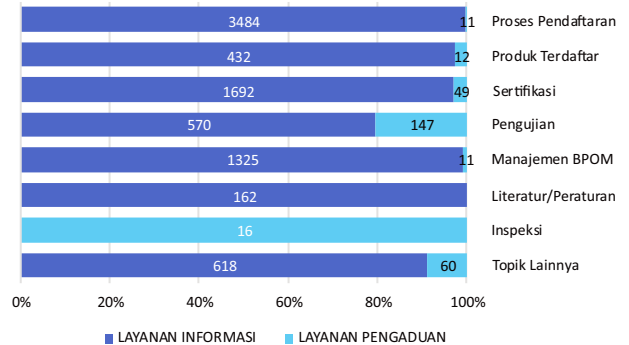
- c. Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 4.120 (49,74%) layanan informasi dan komoditi yang paling banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat yaitu terkait kosmetika sebanyak 95 (131,05%) layanan informasi.



- d. Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 3.484 (42,06%) layanan. Adapun topik pengaduan yang paling banyak yaitu pengaduan tentang pengujian sebanyak 147 (48,04%) layanan.



Gambar 16. Komoditi Paling Ditanyakan



Gambar 17. Topik Informasi Paling Ditanyakan

Tahun 2019 BPOM telah melakukan 45 kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui media juga melakukan KIE secara langsung ke masyarakat, seperti Car Free Day (CFD), Pameran, kegiatan koordinasi lintas sektor dan lain sebagainya.



KIE Obat dan Makanan bersama lintas sektor di Kab. Purbalingga, Maret 2019



KIE Obat dan Makanan bersama lintas sektor di Kab. Kediri, Maret 2019



Petugas BPOM pada pameran Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 sedang menjelaskan mengenai Aplikasi BPOM mobile kepada Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

KIE langsung ke komunitas masyarakat

KIE di area Car Free Day dalam rangka HUT BPOM Ke-18 (10 Februari)



KIE pada kunjungan mahasiswa/pelajar

Mahasiswa Universitas Ngadi Waluyo (15 Januari)



Pameran/klinik konsumen

- APTISI Gelar Kampus, Jakarta (17-20 Januari)
- PIT IAI (13-15 Maret)
- Hari Konsumen Nasional (19-20 Maret)
- APTISI Gelar Kampus, Bogor (25-28 Maret)



KIE bersama lintas sektor

12 kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat dan lintas sektor di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada bulan Februari dan Maret



Penayangan video di media digital BPOM

7 video di media sosial dan media digital BPOM tentang informasi hoax obat dan makanan, kosmetik online, layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan melalui HaloBPOM 1500533



Siaran pers/ penjelasan/klarifikasi berita

10 kali terkait produk ilegal, penarikan obat antihiper-tensi, obat keras yang dijual online, dan penipuan yang dipublikasikan melalui website dan media sosial BPOM



Wawancara/ talkshow media

4 kali talkshow atas permintaan media televisi dan 2 kali wawancara pimpinan BPOM dengan media



Advertorial di media massa

Pemuatan 1 kali advertorial di media massa pada Februari 2019



Pengelolaan media sosial

- BPOM Official (Instagram, Twitter, Fan Page, dan SMS blast).
- HaloBPOM 1500533 (Instagram dan Twitter).

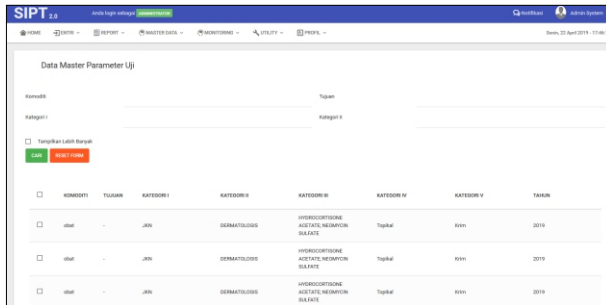


Subsitusite ulpk.pom.go.id

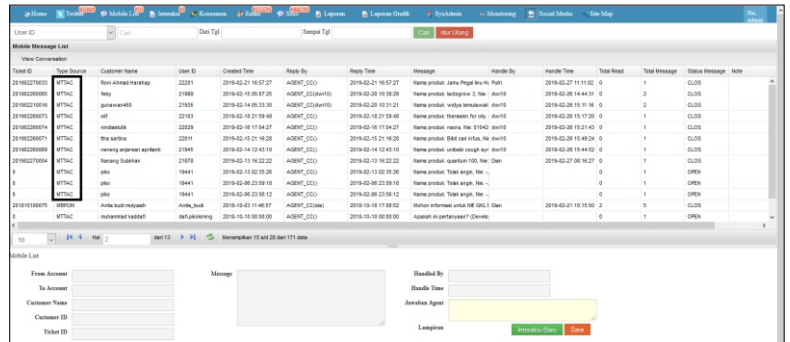
Penyebaran informasi obat dan makanan melalui subsitusite ulpk.pom.go.id melalui menu *Frequently Asked Question (FAQ)*



IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM



Master Data Prioritas Sampling tahun 2019 pada aplikasi SIPT versi 2



Contact center sudah terintegrasi dengan End and Trace Anti Counterfeit Contact Center. Jika data dari TTAC di alirkan ke Halo BPOM maka pertanyaan tersebut akan di balas oleh contact center



Aplikasi Halo BPOM Mobile sudah ada di playstore dan sudah dilakukan update pada menu-menu Halo BPOM

Tools Pengawasan berupa Aplikasi Mobile:

- 1 Menu untuk memindai 2D Barcode
- 2 Menu untuk melihat riwayat pemindaian yang sudah dilakukan
- 3 Menu untuk mengakses berita pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh BPOM
- 4 Menu untuk melakukan pengaduan produk yang tidak ditemukan.

Verifikasi produk terdaftar dengan scan 2d Barcode

Memperoleh berita dalam genggaman

Pengaduan dan jawaban dari BPOM

Aplikasi BPOM Mobile yang dapat digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan melakukan scanning 2D Barcode pada kemasan Obat dan Makanan



V. Perkuat Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Bersama dengan *stakeholder* lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, BPOM ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. BPOM juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Permenkes Tahun 2019. Secara internal, sampai dengan triwulan I tahun 2019 ini, BPOM telah menyelesaikan 5 Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Rancangan 44 Keputusan Kepala BPOM dan 37 Rancangan MoU. Selain itu, BPOM telah melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dan penyuluhan hukum mengenai peraturan Obat dan Makanan, advokasi hukum terhadap *stakeholder* (pengacara dan LSM) serta penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.



4 Judul RUU

1. RUU tentang Perlindungan Konsumen
2. RUU tentang Ketenaganukliran
3. RUU tentang Narkotika
4. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan



6 Judul RPP

1. RPP tentang Pelaksanaan Urusan dan Pemerintah Konkuren
2. RPP tentang Jaminan Produk Halal
3. RPP tentang Revisi PP 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. RPP tentang Keamanan Pangan
5. RPP tentang Label dan Iklan Pangan
6. RPP tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan



2 Judul Rancangan PERMEN

1. Permenkes tentang Pelimpahan Kewenangan Pemasukan dan Pengawasan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus SAS
2. Revisi Permenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau



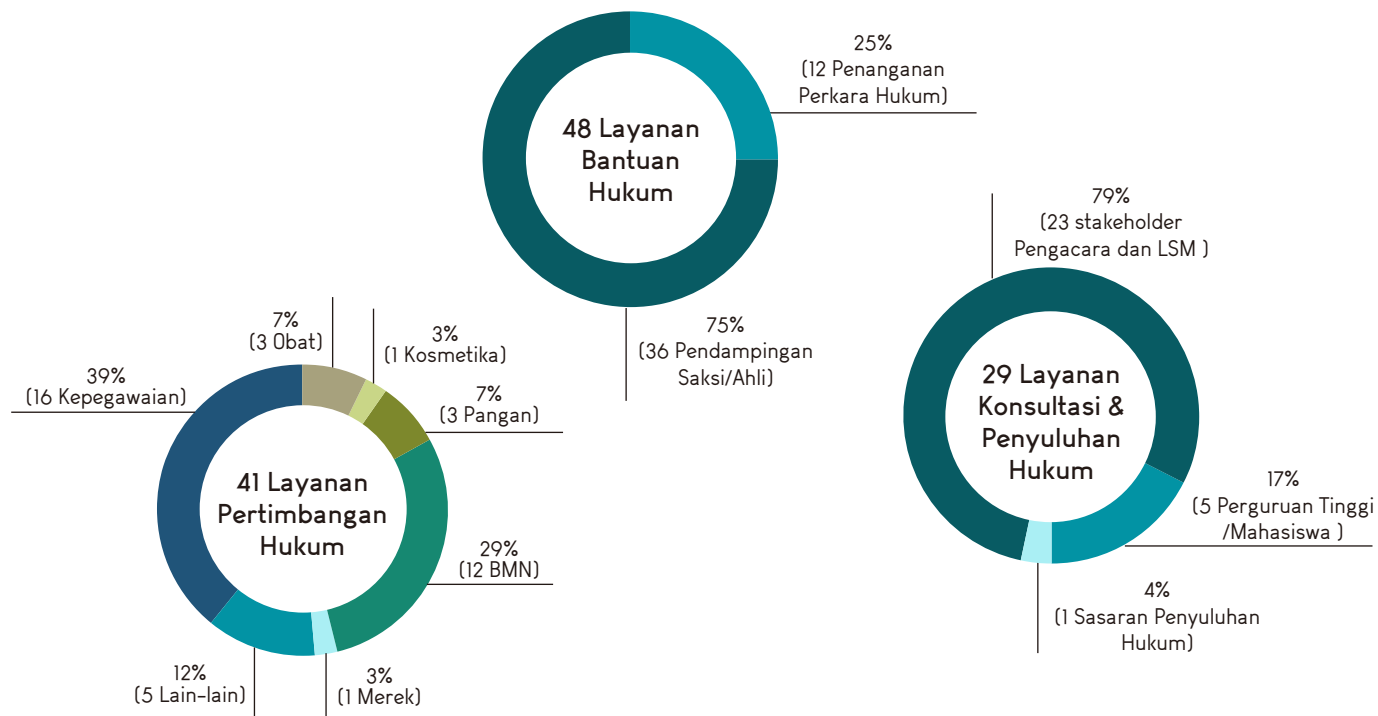
VI. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sejumlah 93 layanan yang terdiri dari :



VII. Kerjasama Internasional

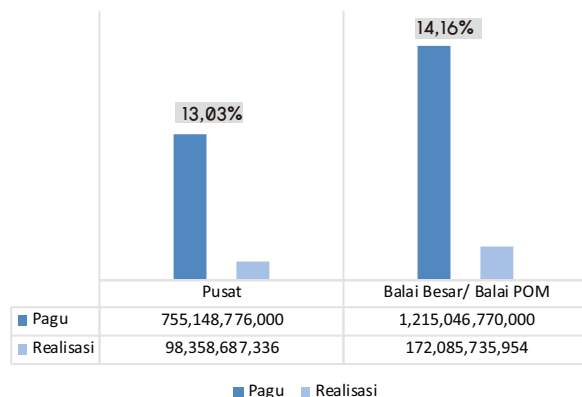
Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Berikut kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan I 2019, diantaranya:

1. **27 Jan - 7 Feb 2019 : Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke AS dan Kanada.** Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, BPOM secara aktif melakukan kerja sama dengan beberapa negara dan lembaga di dunia. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan melaksanakan *transfer of knowledge* dan *benchmark* dengan negara - negara yang dianggap dapat memiliki sistem pengawasan yang cukup baik. Kepala BPOM mengikuti rangkaian acara “*Symposium on the Interface of Regulatory and Analytical Sciences for Biotechnology Health Products*”, yang juga disebut “*Well Characterized Biotechnology Products (WCBP)*” pada . Selain itu, Kepala BPOM juga mengunjungi *Michigan State University (MSU)* untuk peninjauan kerjasama dan rencana penandatanganan MoU antara Badan POM dan MSU. Adapun tujuan kunjungan ke Kanada adalah untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan otoritas pengawas obat dan makanan di Kanada yaitu *Health Canada, Canada Food Inspection Agency (CFIA)* dan *Public Health Association Canada (PHAC)*.
2. **18-21 Februari 2019 : Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Malaysia,** untuk mengoptimalkan pengawasan di perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, Malaysia. BPOM telah mendirikan Kantor BPOM di Kabupaten Sanggau dan Operasionalisasi Pos POM Aruk. Pentingnya peningkatan peran BPOM di perbatasan juga didukung oleh pemangku kepentingan terkait pada saat pertemuan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk. Pada pertemuan ini dibahas tantangan dan peluang pengawasan produk di perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, antara lain ketersediaan bahan pokok penting di daerah perbatasan, pengembangan perdagangan ekspor impor di PLBN, pemberdayaan ekonomi lokal di daerah perbatasan, pemanfaatan PLBN sebagai gerbang aktivitas ekspor impor, praktek perdagangan di perbatasan (*border-trade*), serta peran BPOM dalam mendukung hal tersebut. Selain itu, Kepala BPOM juga melakukan kunjungan ke Rumah Sakit *Normah Medical Specialist Center (RS NMSC)*. Pertemuan bertujuan untuk membahas fenomena *Medical Tourism* yang memunculkan tantangan bagi pemerintah Indonesia, termasuk dalam pengawasan obat. Melalui pertemuan ini juga dipelajari filosofi RS NMSC yang memprioritaskan keselamatan pasien melalui pemenuhan standar yang tinggi dan pelayanan dibandingkan pengembangan bisnis. Saat ini RS NMSC dalam 3 tahun berturut turut sudah terakreditasi dari *Joint Commission International (JCI)* untuk tingkat kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selain itu dipelajari pula pengelolaan obat di NMSC.
3. **27-28 Maret 2019 : Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Singapura,** untuk memenuhi undangan *the Centre for Innovation in Regulatory Science (CIRS)* dan *Centre of Regulatory Excellence (CoRE) Duke-NUS* untuk menghadiri pertemuan CIRS yang mengangkat tema “*Optimising The Regulatory Review Process by Evaluating Performance and Addressing Good Reliance Practices*” yang dihadiri oleh para regulator dari berbagai negara. Pertemuan tersebut diisi dengan *sharing* informasi dan pengalaman dari para narasumber dari beberapa negara seperti Malaysia, Afrika Selatan, Brazil, dan lainnya. Pertemuan bertujuan untuk membahas berbagai inisiatif yang ada saat ini disertai dengan pemahaman mengenai elemen utama terkait aspek “*trust*” yang diperlukan bagi suatu *National Regulatory Authority (NRA)* dalam mengimplementasikan *reliance-based model* secara efektif. Adanya sinergisme hal tersebut akan meningkatkan kemampuan bagi NRA dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai regulator, dengan tetap menjunjung tinggi kualitas hasil keputusan/kebijakan yang diterbitkan, sejalan dengan kepentingan nasional.

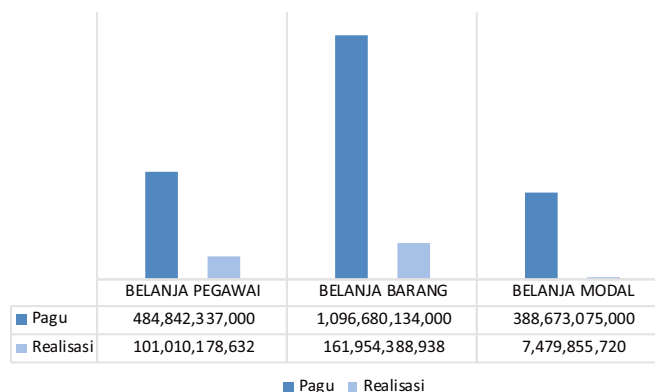
VIII. Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2019, BPOM mendapat anggaran sebesar Rp1.970.195.546.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM.

Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp270.444.423.290,- (13,73%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp98.358.687.336,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp172.085.735.954,-



Gambar 18. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran BPOM Pusat dan Balai s.d. Triwulan I Tahun 2019



Gambar 19. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d. Triwulan I Tahun 2019

IX. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2019. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I tahun 2019 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan 2015-2019 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 31 Maret 2019)

SERAPAN ANGGARAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 SUMBER: APLIKASI OMSPAN
 (Per 31 Maret 2019)

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	398.836.033.000	326.193.503.684	81,79%
	3158 BIRO KERJASAMA	7.525.900.000	761.721.087	10,12%
	3159 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	28.279.300.000	3.990.269.558	14,11%
	4110 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	12.429.149.000	2.078.656.181	16,72%
	4111 BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	29.000.000.000	4.151.838.288	14,32%
	BIRO UMUM DAN SDM	282.377.012.000	38.201.058.354	13,53%
	3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	68.468.001.000	42.700.000	0,06%
	4112 Pengelolaan SDM BPOM	213.909.011.000	38.158.358.354	17,84%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	51.836.895.000	7.501.203.525	14,47%
	4122 DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.833.970.000	1.740.469.850	17,70%
	4123 DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	11.025.670.000	2.059.801.812	18,68%
	4125 DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	10.254.400.000	1.167.130.119	11,38%
	4127 DIT. REGISTRASI OBAT	10.810.000.000	1.359.170.535	12,57%
	4131 DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	9.912.855.000	1.174.631.209	11,85%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	41.096.377.000	6.472.984.116	15,75%
4119	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12.366.155.000	2.563.650.911	20,73%
4121	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	11.240.866.000	1.389.688.821	12,36%
4128	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.397.528.000	1.538.475.989	13,50%
4129	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.091.828.000	981.168.395	16,11%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	58.870.422.000	8.494.549.087	14,43%
4120	DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	9.553.024.000	1.777.814.231	18,61%
4124	DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAM RISIKO RENDAH DAN SEDANG	14.965.142.000	2.120.238.984	14,17%
4126	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.979.000.000	1.399.491.323	15,59%
4130	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	10.744.033.000	944.904.691	8,79%
4132	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	14.629.223.000	2.252.099.858	15,39%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	41.432.389.000	2.585.146.194	6,24%
4117	DIT. PENGAMANAN	22.033.980.000	811.439.800	3,68%
4118	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9.250.000.000	815.309.144	8,81%
4134	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	10.148.409.000	958.397.250	9,44%
6	INSPEKTORAT UTAMA	22.124.859.000	3.584.113.000	16,20%
4115	INSPEKTORAT I	15.433.969.000	2.987.056.436	19,35%
4116	INSPEKTORAT II	6.690.890.000	597.056.564	8,92%

NO		SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
7	4133	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	64.960.728.000	7.156.238.381	11,02%
8	4135	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	24.998.654.000	2.155.763.191	8,62%
9	4114	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	58.019.297.000	5.579.724.515	9,62%
10	4113	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	32.197.794.000	5.650.454.059	17,55%
TOTAL SATKER PUSAT			755.148.776.000	98.358.687.336	13,03%
1		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	44.596.604.000	6.503.700.421	14,58%
2		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	63.079.512.000	15.987.935.166	25,35%
3		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	58.592.933.000	12.026.432.528	20,53%
4		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	40.156.932.000	4.264.652.570	10,62%
5		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	60.927.108.000	12.163.442.186	19,96%
6		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	35.853.074.000	5.580.057.320	15,56%
7		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	51.016.109.000	8.342.723.088	16,35%
8		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	46.105.857.000	7.584.627.238	16,45%
9		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	40.476.321.000	6.182.531.026	15,27%
10		BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	30.567.014.000	4.692.107.564	15,35%
11		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	39.944.864.000	5.110.332.128	12,79%
12		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	31.586.653.000	5.248.334.936	16,62%
13		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	30.559.515.000	3.162.954.168	10,35%
14		BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	27.401.412.000	4.083.382.088	14,90%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	56.875.828.000	3.569.872.798	6,28%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	30.524.512.000	4.057.116.466	13,29%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	38.404.651.000	3.880.194.903	10,10%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	28.845.331.000	3.488.696.567	12,09%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	54.763.869.000	7.338.254.575	13,40%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	29.213.134.000	2.800.322.061	9,59%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	32.088.241.000	2.746.390.928	8,56%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	40.291.877.000	4.291.018.648	10,65%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAT ARAM	32.871.567.000	4.708.238.232	14,32%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	35.770.249.000	3.722.253.236	10,41%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	36.485.396.000	4.354.791.677	11,94%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	28.916.880.000	4.382.387.089	15,16%
27	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	30.851.282.000	8.184.067.574	26,53%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26.731.981.000	2.821.533.841	10,55%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	20.941.272.000	2.601.740.858	12,42%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	18.340.188.000	2.629.180.748	14,34%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	29.260.880.000	2.663.883.305	9,10%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	26.898.298.000	1.741.336.088	6,47%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	16.107.426.000	1.171.243.933	7,27%
TOTAL SATKER DAERAH		1.215.046.770.000	172.085.735.954	14,16%
TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH		1.970.195.546.000	270.444.423.290	13,73%



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2019



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI